

RINGKASAN

Dian Hellena Putri
NIM 200510246

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI
BALAS DENDAM YANG DILAKUKAN
MELALUI *CYBERCRIME***

(Nuribadah, S.H., M.H. dan Dr. Zainal Abidin S.H., M.Hum)

Meningkatnya kejahatan berbasis online atau yang disebut dengan *cybercrime* yaitu salah satunya adalah kejahatan pornografi balas dendam. Pornografi balas dendam merupakan kegiatan menyebarkan materi pornografi atau asusila milik seseorang biasanya dengan motif balas dendam akibat berakhirnya suatu hubungan. Perempuan sebagai korban mendapatkan viktimisasi dari masyarakat sehingga mengakibatkan trauma yang berat. Sehingga perlu perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban baik saat persidangan maupun setelah penjatuhan hukuman sebagai bentuk pemulihan terhadap kondisi psikis korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime* dan melihat bagaimana penanganan pasca pemulihan terhadap korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari perundang-undangan serta bahan bacaan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, Analisis data yang dilakukan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime* diantaranya, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya perlindungan terhadap pemulihannya dapat ditemukan dalam Pasal 70 ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan rehabilitasi medis, sosial dan mental dan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, pemberian restitusi dan kompensasi, reintegrasi sosial, serta hak untuk penghapusan konten bermuatan seksual.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Pornografi Balas Dendam, *Cybercrime*, Pemulihan

SUMMARY

Dian Hellena Putri
NIM 200510246

***LEGAL PROTECTION OF WOMEN VICTIM
 OF REVENGE PORNOGRAPHY CARRIED
 OUT THROUGH CYBERCRIME***

(Nuribadah, S.H., M.H. and Dr. Zainal Abidin S.H., M.Hum)

The increase in online-based crimes or what is called cybercrime, one of which is the crime of revenge pornography. Revenge pornography is the activity of spreading someone's pornographic or immoral material, usually with the motive of revenge due to the end of a relationship. Because women are often used as sexual objects in society, women as victims are victimized by society, resulting in severe trauma. So there is a need for legal protection for women as victims both during trial and after sentencing as a form of restoration to the victim's condition.

This study aims to explain the legal protection that can be given to female victims of revenge pornography committed through cybercrime and to see how post-recovery treatment is carried out for victims of revenge pornography committed through cybercrime.

This study uses a qualitative method with a normative legal approach. Data are obtained from legislation and conceptual and other legal reading materials related to the research. Data collection techniques are carried out by conducting a literature study of legal materials, Data analysis is carried out descriptively.

Based on the research results, it is known that there are several laws that regulate legal protection for women victims of revenge pornography committed through cybercrime, including, Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the second Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 29 in conjunction with Article 4 paragraph (1) Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Article 14 paragraph (1) and Article 4 paragraph (1) and (2) of the Law -Law Number 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence. Furthermore, protection for recovery can be found in Article 70 paragraphs (1)-(3) of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence with ongoing medical, social and mental rehabilitation and health services, provision of restitution and compensation, social reintegration, as well as the right to removal of sexually charged content.

Keywords : Legal Protection, Women, Revenge Porn, Cybercrime, Recovery